

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.667791/2022**

Revisi ke 01

Tanggal : 15 Desember 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (11) | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 3. Provinsi | : (32) | KEPULAUAN RIAU |
| 4. Kode/Nama Satker | : (667791) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU |
| Sebesar | : Rp. | 212.974.000 (DUA RATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen
013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	212.974.000
Rp.	212.974.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 212.974.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN TANJUNG PINANG | (009) Rp. | 212.974.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

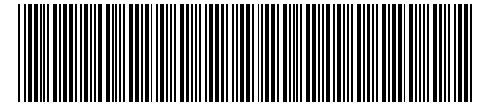
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4860-8071-1509-4450

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

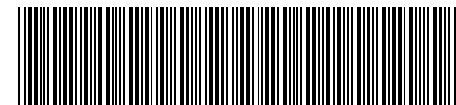
Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			212.974.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			212.974.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
		2. 02	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	212.974.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Pengkajian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	205.694.000
		02 ABD.002	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	7.280.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4860-8071-1509-4450

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
667791	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	212.974	-	-	-	212.974		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	212.974	-	-	-	212.974		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	212.974	-	-	-	212.974		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	212.974	-	-	-	212.974	32 . 52	
01	RM	-	212.974	-	-	-	212.974	009@	
JUMLAH		-	212.974	-	-	-	212.974		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4860-8071-1509-4450

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667791) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	667791	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU														
		RENCANA PENARIKAN DANA	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	24.399	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.385	212.974
		BELANJA BARANG	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	24.399	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.385	212.974
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	24.399	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.385	212.974
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	24.399	17.119	17.119	17.119	17.119	17.119	17.385	212.974

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2022
IV A. B L O K I R**



DS:4860-8071-1509-4450

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667791] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

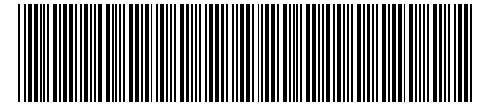
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
667791	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 41.545		
	52 Belanja Barang Rp. 41.545		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.390		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.100		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.905		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.150		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667791/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:4860-8071-1509-4450

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667791] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP., M.Si
NIP 196207021987032001